



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI
Jl. Raya Puputan Niti Mandala Renon Denpasar 80234
Telp/Faksimile : (0361) 228718

Laman : <http://bali.kemenkum.go.id>, Pos-el: kanwilbali@kemenkum.go.id

20 Oktober 2025

Nomor : W.20.LT.01.03-6092
Lampiran : 2 (dua) eksemplar
Sifat : Penting
Hal : Undangan Mengikuti Kegiatan Diskusi
Strategi Kebijakan

Yth. Posyankumhamdes
Se- Provinsi Bali
di tempat

Dalam rangka meningkatkan pemanfaatan hasil analisis kebijakan di bidang hukum oleh pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk dijadikan data dukung dalam perumusan kebijakan maupun penyusunan rancangan Peraturan Perundang-undangan yang baik, maka diperlukan penyebarluasan hasil (diseminasi) melalui kegiatan **Diskusi Strategi Kebijakan**. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali selaku implementator kebijakan publik di daerah yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia, telah melaksanakan analisis kebijakan dengan topik **“Analisis Evaluasi Dampak Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 20 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pengenaan Tarif Tertentu Terhadap Pelayanan Paten dan Hak Cipta”**.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, bersama ini dengan hormat kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk mengikuti kegiatan Diskusi Strategi Kebijakan dimaksud secara *daring* pada:

Hari/tanggal : Senin, 27 Oktober 2025
Waktu : 10.00 WITA s.d. selesai
Media : Aplikasi *Zoom Meeting*
<https://us06web.zoom.us/j/81329832720?pwd=34MLZ5XwK6tDe1QAQTgVZrxPgZKfwN.1>
ID Rapat: 813 2983 2720
Kode Sandi: DSK2025
Registrasi : <https://bit.ly/Regis-DSK-Bali-2025>

Untuk informasi lebih lanjut mengenai kegiatan Diskusi Strategi Kebijakan ini dapat menghubungi narahubung kami Sdr. I Putu Surya Dharma pada nomor HP. 0812 3886 9929
Demikian kami sampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Eem Nurmanah

Tembusan:

1. Menteri Hukum;
2. Wakil Menteri Hukum;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum;
5. Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum Kementerian Hukum;
6. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum.

SUSUNAN ACARA
KEGIATAN DISKUSI STRATEGI KEBIJAKAN

**“Analisis Evaluasi Dampak Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI
Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengenaan Tarif Tertentu
Terhadap Pelayanan Paten Dan Hak Cipta”**

27 Oktober 2025

No.	Waktu (WITA)	Kegiatan
1.	09.30 – 10.00	Registrasi Peserta
2.	10.00 – 10.10	Pembukaan oleh MC
3.	10.10 – 10.15	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Diskusi Strategi Kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali (hadir secara <i>luring</i>)
4.	10.15 – 10.25	Sambutan sekaligus membuka Kegiatan Diskusi Strategi Kebijakan Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum Kementerian Hukum RI. (hadir secara <i>daring</i>)
5.	10.25 – 10.30	Pengantar Diskusi Strategi Kebijakan Moderator (hadir secara <i>luring</i>)
6.	10.30 – 10.50	Paparan Narasumber I: Dr. Andrieansjah, S.T., S.H., M.M. Sekretaris Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (hadir secara <i>daring</i>) <i>Materi:</i> Arah Kebijakan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 20 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pengenaan Tarif Tertentu pada Pelayanan Paten dan Hak Cipta dalam Pemberian Bantuan Hukum
7.	10.50 – 11.00	Paparan Narasumber II: Prof. Dr. Ni Ketut Supasti Dharmawan, S.H., M.Hum., LL.M. Guru Besar Universitas Udayana - (hadir <i>luring</i>) <i>Materi:</i> Dampak Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 20 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pengenaan Tarif Tertentu Terhadap Pelayanan Paten dan Hak Cipta
8.	11.00 – 11.20	Paparan Narasumber III: Ida Bagus Made Danu Krisnawan, S.H., M.H. Analisis Kekayaan Intelektual Muda - (hadir secara <i>luring</i>) <i>Materi:</i> Penerapan PP 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif PNBP terhadap Tata Cara Pengenaan Tarif Tertentu pada Pelayanan Paten dan Hak Cipta.
9.	11.20 – 12.20	Sesi Tanya Jawab
10.	12.20 – 12.25	Penutup Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kementerian Hukum Bali